



RINGKASAN

DINDA OLIVIA PUTRI. Peran Konsultan Pajak dalam Membantu CV XYZ Menerapkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang PPh Final UMKM . *The Role of Tax Consultants in Helping CV XYZ Implement Government Regulation Number 23 of 2018 concerning MSME Final Income Tax* . Dibimbing oleh SABAR WARSINI

Penerimaan pajak yang semakin besar mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan penerimaan dari pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah memajukan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Sektor usaha di Indonesia yang sedang berkembang dan memiliki potensi besar adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pajak khusus untuk UMKM kemudian terealisasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto tertentu. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan peran konsultan pajak dalam membantu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ, menguraikan perhitungan PPh final CV XYZ, menguraikan mekanisme penyetoran PPh final CV XYZ, menguraikan mekanisme pelaporan SPT Tahunan CV XYZ, dan menerangkan akuntansi PPh Final CV XYZ terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Pengumpulan data untuk laporan tugas akhir dilaksanakan di KKP ABC yang berlokasi di Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu dua bulan yaitu pada 08 Februari 2021 sampai 03 April 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

CV XYZ merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam industri jasa *event organizer*. Dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun, sehingga CV XYZ terdaftar sebagai Wajib Pajak yang berhak untuk menggunakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya CV XYZ dibantu oleh KKP ABC. Setiap bulannya KKP ABC membantu dalam proses perhitungan, penyetoran dan juga pelaporan PPh Final UMKM. KKP ABC juga memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh Final UMKM telah sesuai penerapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Kata Kunci : Pajak Final, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Peredaran Bruto, UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University

